

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING POVERTY IN ISLAMIC PERSPECTIVE EAST JAVA¹

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI JAWA TIMUR PERSPEKTIF ISLAM

Arikha Nur Adhilla, Sri Herianingrum
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
anuradhilla@gmail.com*, sri.herianingrum@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam adalah untuk mencapai *falah* (kebahagiaan di dunia dan akhirat). Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tingkat kemiskinan yang rendah. Kemiskinan adalah masalah kompleks yang perlu diselesaikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten / kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten / kota terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2016. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan analisis regresi data panel fixed-effect model (FEM). Hasil uji-t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten / kota memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Secara bersamaan, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur pada 2012-2016

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, upah minimum, kemiskinan, ekonomi makro islam

ABSTRACT

The purpose of economic development in Islam is to achieve *falah* (happiness in the world and the hereafter). One of the main indicators of the success of economic development is the low level of poverty. Poverty is a complex problem that needed to solve. Several factors that influence poverty are economic growth and district/ city minimum wage. This research aims to know the influence of economic growth and district/city minimum wage on the poverty level in East Java in 2012-2016. The approach used is the quantitative research with regression analysis of the fixed-effect model (FEM) panel data. The result of the t-test in this research indicates that both economic growth and district/city minimum wage has a significant negative effect on poverty. Simultaneously, the two variables have a significant effect on poverty in East Java in 2012-2016

Keywords: Economic Growth, Minimum Wage, Poverty, Islamic Macro Economic

I. PENDAHULUAN

Tujuan dari berdirinya suatu negara adalah meningkatkan kesejahteraan

penduduk melalui proses pembangunan. Dalam pandangan Islam pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai *falah*,

Informasi artikel

Diterima: 08-07-2019
Direview: 23-12-2019
Diterbitkan: 15-06-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Arikha Nur Adhilla

Open access under Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share A like 4.0 International Licence
(CC-BY-NC-SA)



¹ Artikel ini merupakan bagian dari skripsi dari Arikha Nur Adhilla, NIM: 041211432108, yang berjudul, "Pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Kabupaten /Kota Terhadap kemiskinan Di Jawa Timur Tahun 2012-2016."

yaitu kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Usaha pembangunan memiliki tujuan utama untuk menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan yang setinggi-tingginya (Todaro, 2000). Usaha-usaha pembangunan harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan berdasarkan prioritas dan kebutuhan daerah masing-masing dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Oleh sebab itu, laju penurunan jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama untuk menentukan keberhasilan pembangunan dalam suatu negara.

Islam menentang keras terjadinya kemiskinan dan berupaya dalam mengawasi dan mengentaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dapat menghambat individu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan yang bergizi, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, dan pendidikan.

Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup manusia, terutama masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim banyak memberikan definisi dan pesan-pesan dalam menanggulangi

kemiskinan. Al-Qur'an yang dikenal dengan adagiumnya *shalihun likulli zaman wa makan* harus mampu keluar dari nilai-nilai normatifnya yang berupa teks dan mentransformasikan nilai-nilai sosialnya agar dapat dipraktikkan (Ilmi, 2017:68). Beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia, yaitu tingkat upah yang masih rendah dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan aktivitas perekonomian dimana kapasitas produksi semakin meningkat pada suatu periode tertentu. Peningkatan kapasitas produksi dapat menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Pengukuran pertumbuhan ekonomi menggunakan indikator tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan gambaran kesejahteraan faktor produksi yang ikut serta dalam menciptakan kesejahteraan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi. Masalah faktor produksi tersebut

tidak terlepas dari upah yang diberikan kepada pegawai.

Pemerintah Indonesia menetapkan standar upah minimum yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja. Standar upah minimum tersebut berbeda-beda di setiap daerah. Upah minimum ditetapkan berdasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Upah minimum yang diterapkan juga berpengaruh pada keputusan investor yang akan menanamkan modalnya di suatu daerah. Investor akan mempertimbangkan upah minimum yang diterapkan, terutama investor yang ingin mendirikan pabrik atau industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Upah minimum regional yang semakin tinggi meunjukkan tingkat perekonomian yang tinggi.

Angka kemiskinan di Indonesia terbilang tinggi, meskipun setiap tahun Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menyatakan angka penduduk miskin mengalami penurunan. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, angka kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji ke dalam bentuk skripsi dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2012-2016".

Rumusan Masalah

1. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/ kota secara parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2012-2016?
2. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/ kota secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2012-2016?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/ kota secara parsial terhadap kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2012-2016.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/ kota secara simultan terhadap kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2012-2016.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kemiskinan merupakan keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu *intergrated concept* yang mempunyai lima dimensi. Dimensi yang dimaksud adalah kemiskinan (*proper*), ketidakberdayaan (*powerless*), kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), ketergantungan (*dependence*), dan keterasingan (*isolation*) baik secara grafis maupun sosiologis (Chriswardani Suryawati, 2005).

M. Kuncoro (dalam Whisnu Adi, 2011: 20) mengidentifikasi penyebab terjadinya kemiskinan dari sudut pandang ekonomi. Pertama, kemiskinan disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Umumnya, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan berkualitas rendah. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas rendah berpengaruh terhadap rendahnya tingkat produktivitas. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah ini disebabkan rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, terjadinya diskriminasi, atau keturunan. Ketiga, kemiskinan disebabkan adanya perbedaan akses dan modal.

Standar yang digunakan untuk mengukur kemiskinan seseorang bermacam-macam. Nugroho (1995: 30) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, tidak hanya melibatkan faktor ekonomi, namun juga sosial, budaya, dan politik; oleh sebab itu tidak mengherankan jika timbul kesulitan ketika masalah kemiskinan diobjektifkan dalam bentuk angka-angka.

Menurut M. Kuncoro (dalam Ravi Dwi, 2010: 33), dalam mengukur kemiskinan berdasarkan pada konsumsi yang terdiri dari dua elemen, yaitu:

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh kebutuhan sesuai dengan standar gizi minimum dan

kebutuhan dasar yang lain.

2. Jumlah kebutuhan lain yang bermacam-macam, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Foster, Green, dan Thorbecke (FGT) telah membuat rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu:

$$Pa = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^a$$

Keterangan:

- a = 0,12
- z = garis kemiskinan
- y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), y_i < z
- q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = jumlah penduduk

Jika:

1. a = 0, maka diperoleh *Head Count Index* (P₀), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
2. a = 1, maka diperoleh *Poverty Gap Index* (P₁), yaitu indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
3. a = 2, maka diperoleh *Poverty Severity* (P₂), yaitu indeks keparahan

kemiskinan yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Penggambaran kemiskinan di dalam Al-Quran paling sering menggunakan kata fakir dan miskin serta bermacam bentuk dari kedua kata tersebut. Kata miskin berasal dari bahasa Arab, yaitu kata "sakana" yang berarti tenang atau diam. Kata miskin merupakan bentuk *mufrad*, *maskin* merupakan bentuk *jama'*, serta *maskanah* merupakan bentuk *mashdar*, terdapat dalam 25 ayat dalam Al-Qur'an yang tersebar pada 19 surat. Di antaranya yaitu:

فَكَفَّرْتَهُمْ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

Artinya: "Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu." (QS. Al-Maidah/5:89, Departemen Agama RI)

Selanjutnya, kata fakir diambil dari kata "faqr" yang artinya tulang punggung. *Faqir* adalah orang yang tulang punggungnya patah, dalam arti beban yang dipikul sedemikian berat sehingga mematahkan tulang punggungnya. Kata *faqir* merupakan bentuk *mufrad*, *fuqara* merupakan bentuk *jama'*, dan *faqr* merupakan bentuk *mashdar*. Kata-kata tersebut sering dipergunakan dalam

Al-Quran dalam berbagai arti seperti dalam ayat berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perkalan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah/9:60, Departemen Agama RI)

Dalam ayat ini Allah mengemukakan bahwa *fuqara* adalah kelompok yang berhak menerima zakat (perlu disantuni secara sosial). Orang-orang fakir dan miskin sama-sama merupakan golongan yang harus diberi zakat untuk mengentaskannya dari kemiskinan (Ahyani, 2016:48).

Penyebab utama yang melahirkan kemiskinan adalah sistem ekonomi yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Dalam struktur ekonomi Indonesia, misalnya penduduk kota lebih diuntungkan dari masyarakat di desa. Persentase perputaran uang jauh lebih besar di kota, terutama di Jakarta dan kota-kota di pulau Jawa daripada di desa, sehingga menyebabkan kehidupan di desa sulit berkembang (Harun, 1999:57).

Namun kemiskinan tidak hanya semata-mata terjadi karena sistem ekonomi. Dalam kenyataannya kemiskinan merupakan perwujudan dari interaksi yang melibatkan hampir semua aspek yang dimiliki manusia dalam kehidupan. Dengan demikian terdapat hubungan antara kemiskinan dengan kondisi manusia itu sendiri, kondisi alam, dan kondisi masyarakat.

Faktor pertama yang mempengaruhi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita dimana ada dua sisi yang diperhatikan, yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Pada dasarnya PDRB adalah jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu., atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun-tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga menggunakan PDRB berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan ekonomi selalu dinyatakan dalam bentuk prosentase yang merupakan perhitungan dari pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga prosentase pertumbuhan ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\Delta Y = \Delta PDRB = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ΔY = $\Delta PDRB$ = Pertumbuhan Ekonomi

$PDRB_t$ = PDRB tahun ke-t

$PDRB_{t-1}$ = PDRB tahun sebelumnya (t-1)

Dalam tinjauan Islam, Sadeq mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah "*a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare*" (sebuah pertumbuhan produksi atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia). Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Sistem ekonomi Islam menggunakan parameter *falah* dalam mencapai tujuan ekonomi. *Falah*

merupakan kesejahteraan yang hakiki, dimana aspek-aspek rohaniah terdapat dalam pengertian *falah* ini. Menurut Huda (2008:28), ekonomi Islam dalam arti sebuah sistem ekonomi (*niidhom al-iqtishad*) merupakan sistem ekonomi yang dapat mengantarkan umat manusia kepada *real welfare (falah)*, yaitu kesejahteraan yang sebetulnya.

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu sumber daya yang dapat dikelola, sumber daya manusia, wirausaha, dan teknologi (Ahmad, 1997 dalam Naf'an, 2014:238). Menurut Mannan (1997:379) jika dilihat dari aspek material, penekanan pada kenaikan pendapatan perkapita dan pertumbuhan yang cepat secara terus menerus tidak bisa menjamin terciptanya kondisi Islami untuk pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut tidak dapat mengatasi masalah luasnya kesenjangan dalam pembagian pendapatan, yang mana merupakan masalah utama dalam sistem ekonomi Islam

Prioritas dalam pertumbuhan ekonomi adalah pemerataan (*growth with equity*) dan pertumbuhan itu sendiri (*growth an sich*). Keduanya dibutuhkan secara simultan. Islam memandang pentingnya pemerataan karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat.

Menurut al-Thariqi (2004:301-322) Islam harus memiliki karakteristik sendiri

untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komprehensif (*al-Syumul*)

Pertumbuhan lebih dari sekedar persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai. Aspek material, moral, ekonomi, sosial spiritual, dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya material namun juga akhirat.

2. Berimbang (*tawazun*)

Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun juga terjadinya keadilan distribusi. Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah yang berbunyi:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا
اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

Artinya: "Berbuat adililah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan." (QS. Al-Maidah/5:8)

Pertumbuhan juga memerlukan adanya keberimbangan usaha-usaha pertumbuhan. Oleh karena itu, Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri

yang mengabaikan pertanian atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan sarana umum dan prasarana pokok lainnya.

3. Realistis (*Waqi'iyah*)

Realistis adalah pandangan terhadap permasalahan yang sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan persyaratan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam tidak mungkin menetapkan aturan-aturan idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya.

4. Keadilan (*'adalah*)

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distributif. Dari realitas yang ada kesenjangan yang terjadi antara orang kaya dan miskin sangat terlihat, baik di negara-negara berkembang, maupun negara maju.

5. Bertanggungjawab (*mas'uliyah*)

Islam memberikan kebebasan terhadap individu dalam bidang apapun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kebahagiaan di dunia, namun kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Karakteristik ini juga berkaitan dengan aspek lain

dalam pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus *sustainable*. Pertumbuhan harus memperhatikan faktor ekologi dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan kelestariannya.

6. Mencukupi (*Kifayah*)

Ahli fikih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang, dan papan dalam batas yang seharusnya.

7. Berfokus pada manusia (*Ghayatuha al-Insan*)

Berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja, Islam memperluas wilayah jangkauan obyek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan yang lebih besar, yaitu pembangunan umat manusia. Fungsi utama islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.

Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi kemiskinan adalah upah minimum yang ditetapkan. Upah

merupakan pembayaran jasa-jasa fisik maupun mental kepada tenaga kerja. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayar atas tenaga mental dan fisik yang digunakan dalam proses produksi (Sukirno dalam I Made Yogatama, 2010:24).

Simanjuntak (1985:110) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip dari sistem pengupahan adalah:

1. Mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
2. Mencerminkan suatu bentuk imbalan yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.
3. Pemberian insentif yang dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dari pekerja dan pendapatan nasional.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan upah minimum yang harus diberikan kepada pekerja. Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Sasaran dari adanya kebijakan upah minimum adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas kerja, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-

cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003).

Upah minimum dibedakan menjadi dua, yaitu Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Sektoral (UMS). UMR adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun berlaku di suatu daerah tertentu yang dikategorikan menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sedangkan UMS adalah upah yang berlaku dalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor yang dikategorikan menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kab/Kota).

Bahasan mengenai upah dalam konsep Islam relatif sedikit. Hal tersebut tidak berarti bahwa konsep upah tidak diatur oleh syariah, tetapi pembahasan tersebut dirangkul dalam bentuk filosofi yang masih membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Bahasan tentang upah dalam Al Quran bersifat nilai-nilai atau norma-norma (Ayu Sumarni, 2015: 26).

Dalam Islam upah disebut juga dengan *ujrah* yang dihasilkan dari akad *ijarah*. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (*ujrah*) adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Allah mendefinisikan upah melalui ayat Al Quran di bawah ini:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِيمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. Al-Taubah/9:105, Departemen Agama RI).

Berdasarkan tafsir dari ayat tersebut, dalam konsep Islam upah yang diterima seseorang atas pekerjaannya ada dua bentuk, yaitu upah dunia dan akhirat. Dengan kata lain, upah dunia adalah upah dalam bentuk materi atau uang, sedangkan upah akhirat adalah pahala yang didapatkan untuk bekal di akhirat.

Secara umum Islam tidak memberikan upah di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pekerja. Namun Islam juga tidak membolehkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu. Islam juga mengakui adanya perbedaan jumlah upah itu sendiri karena adanya dua faktor, yaitu faktor nilai kerja (faktor obyektif) dan faktor kebutuhan pekerja (faktor subyektif) (Yusuf al-Qardhawi, 1995:375). Dengan adanya faktor nilai kerja, maka upah antara orang berpendidikan dan tidak berpendidikan tidak bisa disamakan. Sedangkan dengan

adanya faktor kebutuhan pekerja, maka upah ditentukan berdasarkan kebutuhan pokok pekerja dimana kebutuhan tersebut termasuk juga kebutuhan keluarganya.

Prinsip utama dalam pemberian upah dalam Islam adalah adil dan layak. Adil dalam konsep upah memiliki dua makna. Yang pertama, adil bermakna jelas dan transparan yang artinya waktu pembayaran upah harus jelas dan transparan jumlahnya. Yang kedua, adil bermakna bermakna proporsional, sesuai dengan berat pekerjaannya dan kinerjanya. Nabi Muhammad SAW bersabda; "Barangsiapa yang mempekerjakan buruh, maka beri tahulah tentang kadar upahnya." (HR. al-Baihaqi). Beliau juga bersabda; "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringnya kering." Sedangkan prinsip layak dalam konsep upah dilihat melalui tiga aspek, yaitu sandang, pangan, papan. Artinya hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal dan sesuai dengan pasaran. Konsep inilah yang paling membedakan konsep upah menurut ekonomi barat dengan ekonomi Islam dimana tidak dapat dipisahkan dengan aspek moralitas.

Dalam buku yang berjudul *Islamic Business Theory and Practic*, Wilson (dalam Riskiansyah, 2017:14) mengatakan bahwa perusahaan itu bukanlah perusahaan keluarga, para majikan seringkali memperhatikan kehidupan karyawan di luar lingkungan kerja. Rasulullah bersabda

dalam sebuah hadits yang diriwayatkan imam Muslim; "*Hamba sahaya (yang bekerja) hendaknya diberi makan dan pakaian.*" (HR. Muslim). Dari hadits tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam mempekerjakan seseorang tidak hanya memberikan upah sesuai dengan yang disepakati, namun juga memberikan tunjangan (Murtadho, 2013:12).

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/ kota berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur periode tahun 2012-2016.
2. Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/ kota berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur periode tahun 2012-2016.

III. METODE PENELITIAN

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilaksanakan dengan metode dokumenter, artinya data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah didokumentasi oleh instansi atau dinas terkait (BPS dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur).

Definisi Operasional Variabel

1. Tingkat Kemiskinan adalah perbandingan jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan terhadap jumlah total penduduk provinsi Jawa Timur. Variabel kemiskinan yang digunakan adalah persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 berdasarkan *Head Count Index* (HCI) dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan ekonomi (X_1) adalah perubahan jangka panjang secara perlahan melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di kabupaten/kota di Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun 2012-2016 (dalam satuan persen).
3. Upah minimum kabupaten/kota adalah upah bulanan terendah yang diterapkan pelaku usaha kepada buruh atau karyawan serta sudah meliputi upah pokok dan tunjangan tetap dengan jumlah yang berbeda-beda di setiap kabupaten/kota Jawa Timur.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dalam menganalisis data, yaitu menggabungkan data *time series* dan data *cross section*. Alasan

menggunakan pendekatan data panel dikarenakan data-data yang akan diolah dan diuji terdapat jenis data *time series* yang mengobservasi pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota selama tahun 2012 hingga tahun 2016, serta terdapat jenis data *cross section* yang merupakan variabel dari 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur.

Tahapan dalam pengerjaan data panel dilalui dengan penentuan model estimasi (terkait dengan model yang digunakan), penentuan model estimasi, dan pengujian hipotesis.

Uji asumsi klasik tidak diperlukan dalam analisis data panel. Hal ini disebabkan data panel dapat meminimalkan bias yang kemungkinan besar muncul dalam hasil analisis. Data panel dapat memberikan lebih banyak informasi, variasi, dan *degree of freedom*.

Terdapat tiga teknik estimasi digunakan dalam data panel yaitu model OLS *pooled*, model efek tetap (*Fixed Effect Model*), model efek random (*Random Effect Model*) (Gujarati, 2012:238). Dari ketiga pendekatan tersebut diperlukan pemilihan metode yang paling tepat. Penentuan model terbaik antara OLS *pooled* dan Model Efek Tetap (FEM) adalah menggunakan Uji F Statistik, sedangkan antara Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*) dan Model Efek Random (*Random Effect Model*) menggunakan Uji Hausman.

Pada pengujian kebenaran dalam hipotesis, digunakan pendekatan

pengujian statistik yang disebut uji signifikansi. Uji statistik dilakukan untuk mengetahui bermakna atau tidaknya variabel atau model kita secara individu (parsial) maupun secara keseluruhan (simultan). Uji statistik dilakukan terhadap masing-masing model di setiap tahun penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Uji F (Koefisien Simultan)

Uji F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak layak. Layak yang dimaksud adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat berpengaruh secara simultan.

2. Uji t (Koefisien Regresi)

Uji t dalam regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi model regresi linear berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Maksud dari tepat adalah parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikatnya.

3. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi menjelaskan proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. atau dapat dikatakan bahwa fungsi uji R² adalah untuk menentukan apakah variasi dari variabel bebas yang ada

dalam persamaan estimasi telah menjelaskan variasi dari variabel terikatnya dengan baik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik

Berdasarkan hasil dari Uji Chow dan Uji Hausmann, model estimasi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*. Berikut hasil statistik menggunakan *fixed effect model*:

1. Hasil Uji t (Koefisien Parsial)

a. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Nilai t statistik yang diperoleh sebesar -2,552 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0013 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) secara individu/parsial berpengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Sementara nilai koefisien yang diperoleh adalah sebesar -0,0000467.

b. Pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan

Nilai t statistik yang diperoleh sebesar -3,876 dengan nilai signifikansi sebesar 0,0002 atau lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti variabel upah minimum (X_2) secara individu/parsial berpengaruh terhadap variabel kemiskinan (Y). Sementara Nilai koefisien yang diperoleh sebesar -

0,00000543 menunjukkan bahwa variabel upah minimum kabupaten/kota mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tanda negatif menunjukkan hubungan negatif yang artinya bahwa kenaikan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1 rupiah akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,00000543 jiwa.

2. Hasil Uji F (Koefisien Simultan)

Nilai F statistik yang diperoleh sebesar 1486,913 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 atau 5%, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil yang disimpulkan adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota secara bersama-sama mempengaruhi variabel kemiskinan.

3. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil perhitungan R-squared adalah sebesar 0,997, artinya 99,7% variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota mampu menjelaskan variasi kemiskinan, sementara untuk sisanya 0,3% dijelaskan oleh variabel lainnya. Angka koefisien determinasi yang ditunjukkan dalam hasil pengolahan data sangatlah tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel bebas sangat akurat untuk menjelaskan variabel terikat yang ada.

Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Tanda negatif pada nilai koefisien menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dari PDRB naik sebesar 1 juta rupiah, maka jumlah penduduk miskin akan mengalami penurunan sebesar 0,0000467 jiwa/orang dengan asumsi variabel lain dianggap tetap (*ceteris paribus*).

2. Pengaruh upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan

Nilai koefisien sebesar -0,00000543 menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum kabupaten/kota sebesar 1 rupiah akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,00000543 jiwa.

3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota terhadap kemiskinan

Variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan kenaikan upah minimum kabupaten/kota akan meningkatkan permintaan agregat. Dari sisi permintaan agregat (AD), perubahan struktur ekonomi yang terutama didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat yang terefleksi dalam perubahan pola konsumsinya. Peningkatan permintaan agregat tersebut mengindikasikan

adanya peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi masyarakat yang sejahtera disinggung di dalam Al-Quran surat quraisy berikut ini:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۗ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ حَوْفٍ ۗ

Artinya: "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut." (QS. Quraisy/106:3-4, Departemen Agama RI)

Dalam ayat tersebut dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan ada tiga, yaitu menyembah Allah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut. Indikator menghilangkan lapar menunjukkan terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif signifikan, sedangkan upah minimum kabupaten/kota secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2016.
2. Variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten/kota secara simultan (bersama-sama)

terbukti berpengaruh signifikan tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2016.

Saran

Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian yang sudah diperoleh adalah:

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan tidak semakin bertambah, misalnya dengan cara mengatur pembayaran zakat dalam Undang-Undang.
2. Standar penetapan KHL perlu dilakukan secara bijaksana mengingat besaran KHL menjadi acuan dalam menentukan upah minimum kabupaten/ kota.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggambarkan dan menjelaskan pengaruh variabel-variabel lainnya, selain variabel dalam estimasi ini, terhadap tingkat kemiskinan yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, Shidqi. (2016). Kemiskinan dalam perspektif al-qur'an dan solusinya dalam pandangan Islam (Studi pemikiran Sa'ad Ibrahim dan Yusuf Qardhawi tentang penanggulangan kemiskinan). *Jurnal Kariman*, 4(1), 43-64.

Harun, Salman. (1999). *Mutiara Al-Qur'an: Aktualisasi pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan*. Jakarta: Logos.

Huda, Nurul dkk. (2008). *Ekonomi makro Islam: Pendekatan teoritis*, edisi pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Ilmi, Syaiful. (2017). Konsep pengentasan kemiskinan perspektif Islam. *Jurnal Al-Maslahah*, 13(1), 67-84. DOI: <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i1.918>

Kuncoro, Mudrajad. (2011). *Metode kuantitatif teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mannan, Abdul. (Tanpa Tahun). *Teori dan praktik ekonomi Islam*. Terjemahan oleh M. Nastangin 1997. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Naf'an. (2014). *Ekonomi makro: Tinjauan ekonomi syariah*, cetakan pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ridwan, Murtadho. (2013). Standar upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam. *Jurnal Equilibrium*, 1(2), 241-257.

Riskiansyah, M. (2017). *Pengaruh upah karyawan terhadap kinerja karyawan bagian lapangan pada toko classic dalam perspektif Islam*. Skripsi tidak diterbitkan. Palembang: UIN Raden Fatah.

Simanjuntak, Payaman J. (1985). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.

Suryawati, Chriswardani. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(3), 121-129.

Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, edisi kedelapan, terjemahan oleh Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.

LAMPIRAN**Hasil Estimasi Fixed Effect Model**

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 06/21/19 Time: 00:42

Sample: 2012 2016

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE	-4.67E-05	8.45E-05	-2.552704	0.0013
UMK	-5.43E-06	1.40E-06	-3.876967	0.0002
C	135.7830	2.022385	67.14004	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997420	Mean dependent var	126.9828
Adjusted R-squared	0.996749	S.D. dependent var	77.08027
S.E. of regression	4.394789	Akaike info criterion	5.983380
Sum squared resid	2897.126	Schwarz criterion	6.666964
Log likelihood	-528.4211	Hannan-Quinn criter.	6.260290
F-statistic	1486.913	Durbin-Watson stat	1.211363
Prob(F-statistic)	0.000000		